

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Iklm usaha dan persaingan bisnis yang semakin kompetitif menuntut setiap badan usaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya secara efektif agar mampu bertahan dan berdaya saing dengan badan usaha lain. Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang mengombinasikan dan mengorganisir sumber-sumber daya dengan tujuan mencari laba atau keuntungan. Berbeda dengan badan usaha, perusahaan merupakan alat untuk mencapai tujuan, yaitu menghasilkan barang atau jasa secara terus menerus agar memperoleh laba.

Ditinjau dari sisi badan usaha atau pelaku bisnis, terdapat 4 (empat) kelompok utama pelaku bisnis dalam sistem perekonomian nasional:

1. BUMN
2. BUMD
3. BUMS
4. Koperasi

Di negara berkembang, koperasi perlu dihadirkan dalam kerangka institusi yang dapat menjadi mitra negara dan berperan aktif sebagai penggerak pembangunan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran antara kesamaan dan kemuliaan tujuan negara sudah seharusnya digerakkan koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berbagai regulasi dan aplikasi Undang-undang yang mengatur

koperasi dihadirkan dengan maksud mempercepat pengendalian koperasi dan memberikan arah bagi pengembangan koperasi.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dinyatakan bahwa:

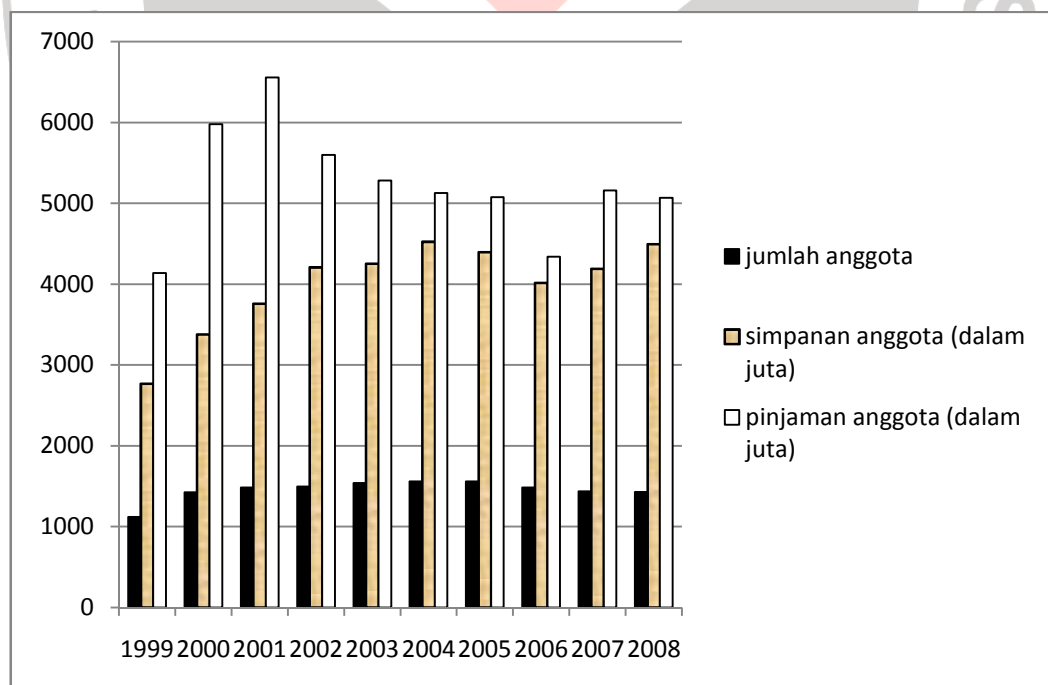
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan

Sebagai sebuah badan usaha, koperasi bergerak dalam pasar uang dengan bertindak sebagai pihak yang melakukan permintaan maupun pihak yang menawarkan uang. Sebagai pihak peminta, koperasi dapat mengajukan pinjaman dari lembaga sejenis maupun lembaga-lembaga keuangan lainnya yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagai pihak yang menawarkan uang, maka koperasi dapat memberikan kredit pinjaman kepada para anggota maupun non-anggotanya bila diperlukan. Andil koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat adalah bahwasannya koperasi diharapkan mampu memberikan solusi atas berbagai tantangan dan perubahan dalam dunia perekonomian, terutama melalui peningkatan kemampuan usaha dalam mendukung kemitraan koperasi dengan para pengusaha kecil melalui usaha simpan pinjam, khususnya melalui ekspansi kredit.

Ekspansi kredit adalah perluasan sarana-sarana usaha yang dilakukan oleh suatu badan usaha agar dapat melayani atau menjalankan kegiatan usahanya dengan kapasitas yang lebih besar. Bilamana ekspansi kredit ini dikaitkan dengan kegiatan operasional Koperasi Simpan Pinjam (KSP) maupun Unit Simpan Pinjam (USP), maka ekspansi kredit dapat didefinisikan sebagai perluasan

kegiatan perkreditan simpan pinjam. Berdasarkan grafik pada Gambar 1.1 dibawah, kondisi pinjaman anggota USP Koperasi Pedagang Pasar Baru (KPPB) Bandung selama kurun waktu 1999 hingga 2008 cenderung berfluktuasi negatif. Dengan kata lain ekspansi kredit hanya terjadi beberapa kali saja selama periode tersebut, yakni pada periode 1999-2000, 2000-2001, dan 2006-2007. Berbeda halnya dengan kondisi simpanan anggota yang dari tahun ke tahunnya relatif mengalami kenaikan. Secara umum, jumlah kredit pinjaman yang disalurkan KPPB Bandung selama kurun waktu 1999 hingga 2008 lebih bersifat kontraktif daripada ekspansif.

Gambar 1.1
Grafik Perkembangan Jumlah Anggota, Simpanan Anggota dan Pinjaman Anggota pada USP KPPB Bandung



Sumber : Laporan Kerja Pengurus dan Badan Pengawas Tahun Buku 2008 (Data Diolah Kembali)

Sebagai penyedia jasa simpan pinjam, koperasi memperoleh modal dari dua sumber: modal sendiri dan modal luar/pinjaman. Dengan adanya modal pinjaman, maka koperasi dituntut untuk selalu berada dalam posisi siap membayar kewajibannya. Dengan kata lain, koperasi senantiasa dituntut untuk selalu menjaga kesehatan tingkat likuiditasnya. Perhitungan likuiditas koperasi dikhususkan pada perhitungan dengan menggunakan rasio volume pinjaman terhadap dana yang diterima/ *Loan to Deposit Ratio* (LDR), sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) KSP/USP tentang Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam yang berlaku. Penjelasan lebih lanjut mengenai aspek likuiditas berdasarkan SOP KSP/USP (2008:163) adalah sebagai berikut:

1. Penilaian kualitatif terhadap aspek likuiditas didasarkan atas rasio antara pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima
2. Untuk rasio 90% atau lebih diberi nilai kredit 0 (nol), untuk rasio di bawah 90% diberi nilai kredit 100 (seratus).

Nilai LDR rata-rata USP KPPB Bandung pada periode 1999 hingga 2008 adalah sebesar 73,36%. Merujuk pada ketentuan SOP yang berlaku, maka nilai ini berada pada rentang rasio kurang dari 90 dan diberi nilai kredit 100. Nilai kredit ini menandakan bahwa secara umum tingkat likuiditas USP KPPB Bandung sudah dapat dikategorikan sehat.

Sebagai koperasi yang bergerak di bidang serba usaha, KPPB Bandung lebih memprioritaskan diri pada keberlangsungan usaha simpan pinjam. Dapat dikatakan bahwa usaha simpan pinjam merupakan *core business* bagi koperasi. Kegiatan utama unit simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan pemberian pinjaman (kredit) kepada anggotanya saja. Bagi non-anggota, koperasi

hanya diperkenankan untuk menyalurkan kredit pinjamannya saja. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Soetarto selaku Deputy Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM dalam artikel yang berjudul *Pemerintah Bakal Larang KSP Himpun Dana dari Non Anggota*, bahwasannya: 'KSP hanya boleh menerima simpanan dari anggota, tetapi mereka boleh menyalurkan kredit ke masyarakat umum atau non-anggota'. Namun beranjak dari ketentuan tersebut, USP KPPB Bandung masih enggan berekspansi secara aktif dalam menyalurkan kreditnya kepada masyarakat luas.

Selain itu, kenyataan bahwa maraknya bank umum yang terjun ke ranah kredit mikro semakin membuat keberadaan usaha simpan pinjam yang dimiliki koperasi semakin terkerdilkan. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Noer Soetrisno selaku Deputy Bidang Pengkajian Sumber Daya Usaha Kecil dan Menengah dalam artikelnya yang berjudul *Koperasi Indonesia: Potret & Tantangan*. Dalam artikel tersebut, disebutkan bahwa posisi koperasi di Indonesia pada dasarnya didominasi oleh koperasi kredit yang menguasai antara 55% sampai dengan 60% dari keseluruhan aset koperasi. Bila dilihat dari populasi koperasi yang terkait dengan program pemerintah, hanya sekitar 25% dari populasi koperasi atau sekitar 35% dari populasi koperasi yang aktif.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua faktor yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap ekspansi kredit. Faktor pertama merupakan faktor internal yakni keengganan koperasi itu sendiri dalam berekspansi. Sedangkan faktor kedua yaitu faktor eksternal, adalah kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada koperasi. Dalam penelitian ini, kedua

faktor tersebut dianggap sama dan dapat diabaikan guna memperjelas maksud dan tujuan penelitian.

Secara langsung, tingkat likuiditas menentukan kemampuan koperasi dalam memobilisasi dana dari masyarakat, yang pada akhirnya menentukan kegiatan penyaluran dana kepada yang membutuhkannya. Salah satu upaya agar koperasi dapat dengan leluasa melakukan ekspansi kredit yakni dengan meningkatkan tingkat likuiditasnya. Dengan tingkat likuiditas yang sehat dan memadai, besar kemungkinan koperasi dapat melakukan ekspansi kredit (perluasan pinjaman).

Namun demikian, tingkat likuiditas USP KPPB Bandung yang sudah dikategorikan sehat belum dimanfaatkan secara efektif untuk berekspansi dalam menyalurkan kreditnya kepada masyarakat luas. Hingga saat ini, USP KPPB Bandung hanya bersedia memberikan pinjaman kepada anggotanya saja. Untuk non-anggota, koperasi masih enggan melayani. Mengingat usaha simpan pinjam merupakan *core business* KPPB Bandung, maka hal ini akan berdampak pada melambatnya proses tumbuh kembang koperasi. Akibatnya koperasi akan stagnan dan sulit untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, muncul ketertarikan penulis untuk meneliti masalah “Pengaruh Tingkat Likuiditas Terhadap Ekspansi Kredit pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Pedagang Pasar Baru Bandung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan pokok dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran tingkat likuiditas pada USP KPPB Bandung
2. Bagaimana gambaran ekspansi kredit pada USP KPPB Bandung
3. Bagaimana pengaruh tingkat likuiditas terhadap ekspansi kredit pada USP KPPB Bandung

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari pengaruh tingkat likuiditas terhadap ekspansi kredit pada USP KPPB Bandung. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran tingkat likuiditas dari USP KPPB Bandung
2. Untuk mengetahui gambaran ekspansi kredit dari USP KPPB Bandung
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat likuiditas terhadap ekspansi kredit pada USP KPPB Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat ditinjau dari segi praktis dan teoritis yaitu:

1. Kegunaan teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu, khususnya ilmu manajemen keuangan, dan

dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Kegunaan praktis. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pengurus yang bermanfaat bagi kemajuan koperasi di masa yang akan datang, terutama yang berkaitan dengan Tingkat Likuiditas dan Ekspansi Kredit.

